

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BAPELITBANG KOTA
TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Muhammad Rizal Irwan

NPP.29.1692

Asdaf Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara

Program Studi Manajemen Pemerintahan

Email: irwanrizal9810@gmail.com

ABSTRACT

Problem statement/background: Innovation in planning and regional development needs to be improved because we have entered the era of digitalization which must utilize information systems to support the implementation of regional development planning. Information systems are very important in improving development planning because it makes it very easy for us to input data that can be monitored directly by the central government.

Purpose: This study aims to find out how the implementation of the local government information system (SIPD) in development planning in the city of Tidore Islands which is the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation No. 70 of 2019 concerning the Regional Government Information System which requires all regional governments to use SIPD in carrying out regional development planning. This research was conducted at the research and development planning agency for the City of Tidore Islands. **Method:** The method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach. The data used are primary data and secondary data collected through interviews and documentation, with a sample of informants determined using purposive sampling technique. **Result:** showed that the City of Tidore Kepulauan has succeeded in carrying out the instructions from the ministry of home affairs related to the implementation of the local government information system, although there are still some obstacles and obstacles faced but have been handled properly so that the implementation of the local government information system can run well.

Conclusion: The implementation of the local government information system has been going well, this is because Bapelitbang has overcome all the problems that occur in the implementation of the SIPD implementation.

Keywords: Local Government Information System, development planning,

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Inofatif dalam melakukan perencanaan dan pembangunan daerah perlu di tingkatkan karena kita telah memasuki era digitalisasi yang harus memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Sistem informasi sangat penting dalam meningkatkan perencanaan pembangunan dikarenakan sangat memudahkan kita untuk menginput data yang dapat di pantau langsung oleh pemerintahan pusat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan di kota tidore kepulauan yang merupakan implementasi dari peraturan menteri dalam negeri no 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah yang mengharuskan seluruh pemerintahan daerah menggunakan SIPD dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah Penelitian ini dilakukan di badan perencanaan penelitian dan pengembangan Kota Tidore Kepulauan. **Metode:** metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan sampel informan yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. **Hasil/Temuan:** penelitian menunjukkan bahwa Kota Tidore Kepulauan telah berhasil melaksanakan instruksi dari kementrian dalam negeri terkait dengan penerapan sistem informasi pemerintahan daerah, meskipun masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi tetapi telah ditangani dengan baik sehingga penerapan sistem informasi pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik. **Keseimpulan:** Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah telah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan Bapelitbang telah mengatasi segala permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penerapan SIPD tersebut.

Kata Kunci : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pada pasal 391 tentang pemerintahan daerah yang harus sediakandata pemerintahan daerah berbentuk data pembangunan wilayah ataupun data keuangan wilayah yang dikelola dalam sesuatu data. Dengan dikeluarkannya permendagri no 70 tahun 2019 tentang sistem Informasi pemerintahan daerah, serta yang tercantum di pasal 1 ayat 12 sistem informasi pemerintahan daerah yang berikutnya disingkat sipd merupakan pengelolaan data pembangunan wilayah, data keuangan daerah, serta data pemerintahan daerah lainnya yang sama-sama tersambung guna terlaksananya proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu dalam peraturan menteri dalam negeri republik indonesianomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara

evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

pengaturan ini diharapkan untuk mampu menunjang dan mendorong terselenggaranya sistem informasi dan data pemerintahan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik dipusat maupun di daerah. serta untuk menambah komitmen dari pemerintah daerah untuk langkah kerjasama berbasis informasi dan data. sehingga bisa untuk membangun database yang ada di daerah yang dapat menggambarkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah dalam mendukung pengembangan system informasi pengelolaan database profil daerah yang efektif dan tepat.

Bapelitbang dipercayakan untuk memeriksa dan menilai presentasi pelaksanaan desain kemajuan daerah, menyelidiki dan menilai pendekatan kualitas untuk perincian strategi dan kontribusi untuk tindakan pengaturan perbaikan berikutnya dan memperhatikan perwakilan pimpinan/pejabat/kota pimpinan balai melalui sekeretaris daerah. Organisasi ini mempunyai tugas pokok membantu pimpinan perwakilan/pejabat/ketua sipil dalam organisasi pemerintahan provinsi di bidang perencanaan dan penganggaran daerah. Dalam membantu mencapai tujuan tersebut, bapelitbang menggunakan kerangka yang dapat meningkatkan kualitas pamerannya.

1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD ialah sistem data yang juga memuat sistem perencanaan pembangunan wilayah serta sistem keuangan wilayah, dan sistem pemerintahan daerah yang lain, tercantum sistem pembinaan serta pengawasan pemerintahan daerah. SIPD berperan pula selaku jejaring dalam pengumpulan informasi secara terpadu, realtime dengan memakai teknologi data yang terpusat secara online, selaku dorongan dalam perencanaan program serta aktivitas dan penilaian pembangunan daerah secara rasional, efisien serta efektif. Sistem ini juga bisa digunakan untuk menunjang integrasi pemanfaatan informasi terpaut dengan pertumbuhan pembangunan pada setiap lembaga pemerintah daerah

Dalam kegiatan pelaksanaan sistem informasi pemerintahan, setiap klien harus memiliki peralatan, pemrograman, dan jaringan web yang hebat Karena menggunakan basis informasi online. Yang dimaksud adalah, sebelum memasukan data harus terhubung dengan jaringan internet dan diharapkan agar masyarakat luas dapat lebih mudah untuk mengakses aplikasi sipd ini. Tetapi berdasarkan informasi dari salah seorang operator di bapelitbang kota tidore kepulauan masih terbatas akan sinyal, dimana jangkauan jaringan yang terlalu jauh sehingga koneksi sering terputus, sehingga saat menginput data memerlukan waktu

yang lama dan cenderung menambah masalah lain dalam penginputan datanya

Kekurangan sumber daya finansial merupakan hambatan yang serius dalam proses pengolahan sistem informasi pemerintahan daerah. Setiap tiga bulan sekali pembaharuan sistem harus selalu dilakukan oleh organisasi perangkat daerah. Hal ini yang membuat pemerintah daerah membutuhkan modal yang lebih besar dari biasanya untuk memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam meningkatkan sistem dengan berkala, dan juga modal untuk merawat sistem dan server serta dana tak terduga untuk memperbaiki jika terjadi masalah teknis seperti adanya hacker serta virus yang memperlambat sistem informasi ini dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Ada juga masalah yang lain seperti di lingkungan internal, dimana komputer yang sering digunakan dalam penggunaan sipd tapi juga digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang lain, sehingga dikhawatirkan akan membuat sistem cepat error dan mengganggu proses pengolahan data

Sumber daya manusia juga merupakan hal yang paling penting dalam pengolahan sistem informasi pemerintahan daerah. SIPD ini membutuhkan kualitas sdm yang berkompeten, handal atau ahli dalam menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) namun yang ada ternyata sdmnya masih kurang. Dikarenakan para pegawai lebih sering mengerjakan dengan cara manual menggunakan aplikasi microsoft excel atau kertas kerja sehingga memerlukan sosialisasi dan pelatihan khusus bagi para pengguna SIPD

Dalam penerapan penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) perlu memperhatikan kesiapannya melihat bahwa sering terjadinya kendala. Sehingga jika tidak diperhatikan dengan benar maka akan sangat mungkin terjadi masalah serta kendala yang menghambat proses penerapan dan pengolahan sistem informasi ini. Oleh karena masalah ini harus segera mungkin diatasi dari awal persiapan, sehingga jika dalam proses persiapan itu sudah aman dan dapat di kendalikan maka tujuan dari efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel dan auditabel dapat diwujudkan dan dilaksanakan dengan cara yang baik agar terciptanya sistem pemerintahan yang berbasis elektronik

Pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dalam pelaksanaan aplikasi berupa website ini yang bertujuan untuk menambah serta mempermudah percepatan dalam penerapan pengawasan serta penilaian pelayanan publik Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, tetapi dalam melaksanakan program ini tidak lah gampang wajib membutuhkan kerjasama serta kerja keras dari tiap lembaga yang ikut mengambil bagian, berdasarkan observasi ini masih adanya keterlambatan penginputan dari tiap lembaga yang harus menginput informasi perencanaannya serta masih terdapatnya operator yang belum paham dalam pemakaian aplikasi berupa website ini, aplikasi berupa website ini juga di pakai di tiap lembaga yang ada di kota Tidore Kepulauan dalam menginput data perencanaan pembangunan wilayah serta Memandang terobosan baru yang digunakan pemerintah Kota Tidore Kepulauan

1.3. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian dari Cintya Infantrina Riady yang berjudul Analisis kesiapan penggunaan aplikasi berbasis online dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas di Kota Tasik Malaya. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pada Dinas Kota Tasik Malaya yang sedang berjalan pada saat ini masih diproses secara manual. Dalam membuat surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) masih berdiri-sendiri, terpisah sehingga data dalam surat tugas dan surat perjalanan dinas bisa terjadi kesalahan dikarenakan tidak terintegrasi dalam sebuah sistem. Berdasarkan analisa terhadap proses yang telah berjalan, maka dibuatlah Aplikasi Berbasis online dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas untuk memudahkan dalam pengelolaan surat perintah perjalanan dinas. Sehingga dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas sudah terintegrasi dengan sistem dan history pada dinas di Kota Tasik Malaya bisa termonitoring dengan baik.

Berdasarkan penelitian dari Citta Nadya dan kawan-kawan dengan judul Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) daerah Kota Manado System informasi pembangunan daerah ini sangat bagus karena dapat memuat seluruh perencanaan pembangunan yang ada di setiap daerah di Indonesia memfasilitasi dan mendorong terwujudnya system data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik di daerah maupun pusat, meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun pola kerja sama berbasis data dan informasi, Membangun database Provinsi, Kabupaten/Kota yang menggambarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki Daerah, mengembangkan system informasi pengelolaan database profil daerah yang valid dan akurat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan, menggunakan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan konsep teori sistem informasi manajemen oleh Laudon dan Laudon

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan di Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan

II. METODE

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan agar peneliti mendapatkan hasil yang maksimal dan memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis

dengan melalui pendekatan analisis induktif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data penulis mengutip dari Bogdan dalam sugiyono (2012:244) mengatakan bahwa analisis data yaitu proses pencarian serta penyusunan dengan cara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan yang lain sehingga dapat memudahkan untuk dipahami untuk dimengerti dan temuannya dapat diberikan untuk orang lain.

III. HASIL/PEMBAHASAN

Penerapan menurut teori merupakan salah satu analisis dari sudut pandang para ahli atau pakar di bidang pemerintahan untuk mengetahui suatu permasalahan. Oleh karena itu konsep teori yang peneliti gunakan yaitu Sistem Informasi Manajemen dari Loudon dengan empat dimensi yaitu organisasi, manajemen, teknologi dan keahlian. Aspek organisasi dilihat dari kordinasi antara Bapelitbang dan perangkat daerah Kota tidore Kepulauan untuk penerapan SIPD dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Aspek manajemen dilihat dari proses proses pelaksanaan penerapan SIPD yang dilakukan Bapelitbang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Aspek teknologi diperlukan untuk penggunaan SIPD yang membutuhkan teknolgi sehingga segala proses penginputan data perencanaan pembangunan tidak lagi dengan cara manual. Sedangkan aspek keahlian dilihat dari sumber daya manusia ahli dan dengan mudah menyesuaikan dengan penggunaan SIPD dalam kegiatan perencanaan pembangunan di Bapelitbang Kota Tidore kepulauan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3.1 Organisasi

Organisasi berperan penting dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) karena dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan organisasi perangkat daerah untuk melakukan koordinasi ataupun kerja sama yang baik. Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Tidore Kepulauan merupakan pelaksana dari kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Tujuan dari kebijakan tersebut akan tercapai apabila organisasi perangkat daerah (OPD) dapat bekerja sama dengan baik sesuai dengan yang diharapkan

Awalnya dalam kegiatan proses penginputan data sampai dengan penyerahan data kepusat masih dengan cara manual sehinggah proses penginputan data mengalami keterlambatan, tetapi sejak adanya kebijakan dari pusat yang mengharuskan seluruh organisasi perangkat daerah untuk menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga dalam kegiatan penginputan data dapat berjalan dengan lebih cepat dan di pantau langsung oleh pusat

3.2 Manajemen

Dalam manajemen, Konsistensi merupakan hal sangat digunakan dalam proses perencanaan

pembangunan yang akan digunakan pada penerapan atau implementasi suatu kebijakan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana kebijakan. Dalam hal ini penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam perencanaan pembangunan di BAPELITBANG Kota Tidore Kepulauan yang sejauh ini BAPELITBANG Kota Tidore Kepulauan masih konsisten menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan mulai tahun 2020 untuk melakukan perencanaan pembangunan, hal ini dibuktikan dengan lebih cepatnya penginputan data setelah menggunakan SIPD ini. Manajemen dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan untuk mendukung perencanaan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan sudah cukup baik hal ini karena BAPELITBANG Kota Tidore Kepulauan sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut dalam manajemennya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan juga BAPELITBANG Kota Tidore Kepulauan sudah baik dalam pelaksanaan atau penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di lihat dari tidak adanya keterlambatan dalam proses penyajian data pembangunan daerah.

3.3 Teknologi

Kita telah memasuki era Revolusi Industri 4.0, yang dimana teknologi informasi sangat berperan penting dalam menunjang kinerja pemerintah dalam menentukan keberhasilan jalannya pemerintahan. Informasi sebagai salah satu sumber daya yang sangat berharga dan penting yang merupakan kemajuan teknologi informasi sehingga dapat dikelola secara profesional. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Tidore Kepulauan sebagai suatu Organisasi Perangkat Daerah dalam transisi menjadi pemerintahan daerah yang dapat menguasai teknologi yang sebagaimana diharapkan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan orang dengan keahlian dalam penggunaan Teknologi Informasi sebagai dasar dalam melakukan pelayanan serta mendukung pengambilan keputusan pemerintah pusat. Pengembangan suatu sistem informasi yang terintegrasi mulai dari daerah hingga pusat merupakan suatu langkah yang dapat ditempuh oleh BAPELITBANG Kota Tidore Kepulauan dalam upaya penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam perencanaan pembangunan terhadap peningkatan kualitas pelayanan untuk masyarakat juga pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

3.4 Keahlian

Dalam penerapan sistem informasi pemerintahan daerah sangat di butuhkan sumber daya manusia yang handal dalam hal ini memiliki keahlian dalam menggunakan teknologi informasi maupun non teknologi. Penguasaan teknologi atau orang yang memiliki keahlian dalam teknologi informasi menjadi penentu dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara menyeluruh, hal ini berkaitan erat dengan IT yang tidak semua orang dapat menguasainya. Begitu pentingnya keahlian dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini, maka infrastruktur jaringan berperan penting dalam hal dasar

untuk membentuk sumber daya manusia yang handal ataupun ahli dalam menggunakan teknologi informasi dalam hal ini adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Bahwa pelaksanaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pada Dinas Kota Tasik Malaya yang sedang berjalan pada saat ini masih diproses secara manual. Dalam membuat surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) masih berdiri-sendiri, terpisah sehingga data dalam surat tugas dan surat perjalanan dinas bisa terjadi kesalahan dikarenakan tidak terintegrasi dalam sebuah sistem. Berdasarkan analisa terhadap proses yang telah berjalan, maka dibuatlah Aplikasi Berbasis online dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas untuk memudahkan dalam pengelolaan surat perintah perjalanan dinas. Sehingga dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas sudah terintegrasi dengan sistem dan history pada dinas di Kota Tasik Malaya bisa termonitoring dengan baik. (Cintya Infantrina Riady 2018)

System informasi pembangunan daerah ini sangat bagus karena dapat memuat seluruh perencanaan pembangunan yang ada di setiap daerah di Indonesia memfasilitasi dan mendorong terwujudnya system data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik di daerah maupun pusat, meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun pola kerja sama berbasis data dan informasi, Membangun database Provinsi, Kabupaten/Kota yang menggambarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki Daerah, mengembangkan system informasi pengelolaan database profil daerah yang valid dan akurat (Citta Nadya dan kawan-kawan 2020)

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukannya factor penghambat dalam penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan daerah di Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan yaitu kurangnya sosialisasi, masih terbatasnya sarana dan prasarana, penginputan data masih dengan cara manual, sering mengalami kendala jaringan

IV. KESEIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Tidore Kepulauan, sudah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan terpenuhinya dimensi Organisasi, Manajemen, Teknologi, Keahlian

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang tergolong singkat yaitu hanya selama 2 minggu, karena waktu yang singkat ini mengakibatkan penelitian yang dilakukan menjadi kurang maksimal. Waktu penelitian yang diberikan juga disesuaikan dengan Kalender Akademik IPDN Tahun 2021/2022

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan terutama kepada kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Tidore Kepulauan beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian serta penulisan ini

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hamdi, Muchlis dan Ismaryati, Siti. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hartono, Bambang. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer* Jakarta: Rineka Cipta.
- Indrayani, Etin dan Gatingsih. 2013. *Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintahan*. Bandung: IPDN PRESS
- Nurdin, Ismail dan Hartati, sri, 2019 *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya:Media sahabat cendekia pondok maritim
- Rianto Nugroho D, 2000, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Jakarta: Elek media Komputindo Kelompok Gramedia
- Siagian, Sondang. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suganda, Daan. 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*,. Bandung : Sinar Baru
- Sugiyono, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Susanto, Azhar. 2007. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Lingga Jaya.
- Taufiq, Rohmat. 2013. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.